

Buletin La'o Hamutuk

Vol. 2, No. 8

December 2001

Tinjauan Tentang Bantuan Bilateral untuk Timor Lorosa'e

Sampai dua tahun yang lalu, masyarakat internasional umumnya mengabaikan Timor Lorosa'e. Pendudukan militer Indonesia yang ilegal menurut hukum internasional telah menghalangi banyak negara untuk mengirimkan bantuan ekonomi kepada Timor Lorosa'e. Tetapi, dengan berakhirnya pendudukan itu, banyak negara mendanai proyek-proyek di sini. Bantuan ekonomi ini tidak bisa menggantikan pengabaian itu, dan jumlah uang yang dikirim para donor tidaklah cukup untuk mengganti kerugian akibat penindasan Indonesia selama hampir 24 tahun – penindasan yang juga didanai dan didukung oleh banyak negara donor yang sama – tetapi penting untuk membuat Timor Lorosa'e kembali berdiri di atas kakinya sendiri.

Bantuan internasional yang paling umum di sini adalah dalam bentuk hibah dan bantuan non-moneter berupa barang dan/atau jasa, karena Timor Lorosa'e masih belum menerima pinjaman. Bantuan ini dapat dikelompokkan sebagai bantuan multilateral atau bilateral. Bantuan multilateral dikelola oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) atau Program Pangan Dunia (World Food Program), yang mengumpulkan sumberdaya dari berbagai negara dan membagikannya ke negara-negara penerima bantuan.

Yang biasanya disebut bantuan bilateral adalah bantuan yang langsung diberikan oleh negara donor kepada negara penerima. Negara donor bisa memberikan bantuannya langsung kepada pemerintah dari negara penerima atau kepada lembaga-lembaga bukan-pemerintah yang bekerja di negara tersebut. Kadang-kadang bantuan dikelola oleh sebuah badan pemerintah yang diberi tugas ini, seperti Australian Agency for International Development (AusAID), tetapi dapat juga melalui saluran lain, seperti latihan militer-kepada-militer secara langsung (tetapi operasi militer internasional seperti PKF di Timor Lorosa'e merupakan bantuan multilateral, dan didanai melalui cara lain). Bantuan bilateral digunakan untuk berbagai tujuan, dari membangun rumah-rumah sakit sampai mendukung advokasi politik.

Meskipun beberapa bantuan bilateral diberikan hanya untuk alasan-alasan kemanusiaan, negara-negara donor biasanya mempunyai tujuan politis ketika memberikan bantuan. Tujuan ini bisa meliputi peningkatan stabilitas regional atau mempengaruhi kebijakan pemerintah penerima bantuan dan masyarakat sipil negara tersebut. Bantuan bilateral sering bersifat "mengikat", artinya negara donor menetapkan syarat-syarat atas

bantuan itu yang mengharuskan dana digunakan untuk membeli barang atau jasa (seperti konsultan yang mahal) dari negara donor. Dengan cara ini, perekonomian negara donor juga mendapat keuntungan.

Selama dua tahun ini, bantuan multilateral maupun bilateral telah diberikan kepada Timor Lorosa'e. Timor Lorosa'e masih belum mempunyai sebuah pemerintah yang merdeka, tetapi saat ini diperintah oleh sebuah lembaga multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini mengaburkan perbedaan antara bantuan bilateral dan multilateral. Definisi kerja dari La'o Hamutuk tentang bantuan bilateral di sini meliputi semua sumbangan sukarela dari pemerintah asing yang secara khusus diperuntukkan bagi Timor Lorosa'e. Ini termasuk bantuan yang diberikan kepada lembaga-lembaga nasional, seperti Pemerintahan Transisi ETTA dan ETPA, atau kepada NGO-NGO lokal. Bantuan ini termasuk bantuan yang dicadangkan bagi Timor Lorosa'e dan dikelola oleh lembaga-lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, yang untuk sementara mengambil tanggungjawab ini. Oleh karena itu bantuan bilateral kepada Timor Lorosa'e mencakup sumbangan dari pemerintah asing kepada dana perwalian TFET dan CFET, sumbangan yang telah ditentukan sasarannya (*targeted contributions*) kepada badan-badan PBB, serta proyek-proyek bilateral yang lebih khusus, seperti proyek pendidikan dan infrastruktur. Meskipun demikian, bantuan ini tidak termasuk bentuk bantuan bukan-sukarela, seperti dana dari sumbangan wajib PBB yang digunakan untuk membiayai pemerintahan UNTAET dan keamanan. (Untuk informasi tentang sumbangan wajib PBB dan sumbangan sukarela serta penjelasan tentang dana yang berbeda-beda ini, lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol. 2, No. 1-2).

Buletin La'o Hamutuk edisi ini menyajikan tinjauan singkat tentang bantuan bilateral kepada Timor Lorosa'e dari enam penyumbang terbesar (Australia, Jepang, Portugal, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris) yang menyediakan sekitar 94% dari bantuan bilateral kepada Timor Lorosa'e. Edisi-edisi berikutnya akan menyoroiti negara-negara donor tertentu dan proyek-proyek mereka di Timor Lorosa'e secara rinci. ❖



Di dalam . . .

Penjelasan Mengenai Statistik dan Grafik	2
Jepang and Portugal	3
Eropa dan Australia	4
Amerika Serikat dan Inggris	5
Berita Singkat	6
Editorial: Para Donor Harus Baik, Tanpa Syarat ...	8

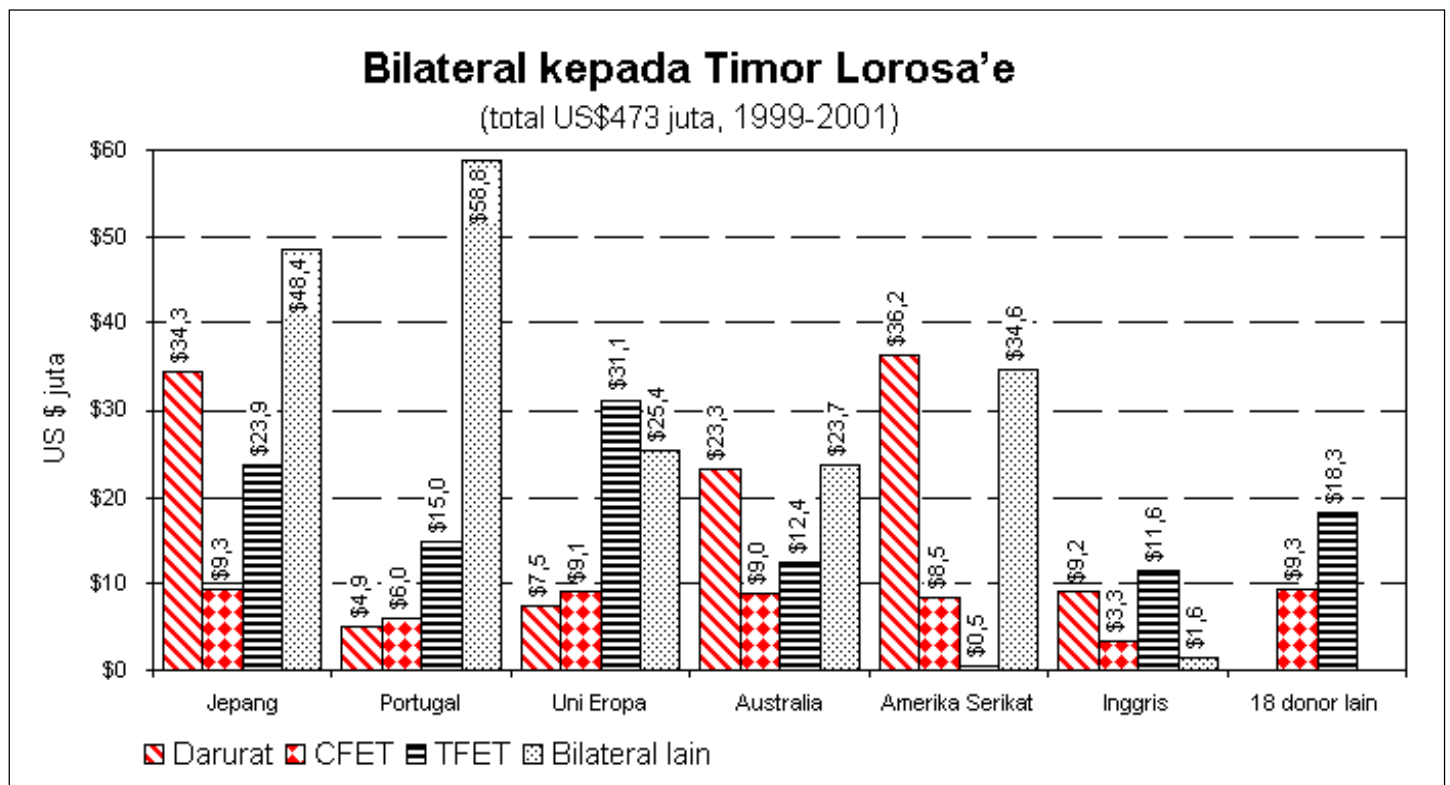
La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e
P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa'e (via Darwin, Australia)
Kantor Baucau: +61(438)143724; lhbaucou@easttimor.minihub.org
Mobile: +61(408)811373; Telepon: +670(390)325-013
Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Web: <http://www.etan.org/lh>

Penjelasan Mengenai Statistik dan Grafik

Dalam *Buletin* ini, kami menyajikan tinjauan tentang bantuan yang secara khusus diberikan kepada Timor Lorosa'e dari berbagai negara donor selama dua tahun terakhir. Ternyata ini merupakan tugas yang sulit. Kami telah berusaha mengubah data ke dalam bentuk yang konsisten, tetapi tetap ada perkiraan dan dugaan. Semua grafik dan angka dinyatakan dalam satuan juta dolar Amerika Serikat.

Angka-angka di bawah ini memaparkan setepat mungkin, sumbangan-sumbangan bilateral yang diterima oleh Timor Lorosa'e antara Oktober 1999 dan akhir Oktober 2001. Kami tidak memasukkan sumbangan wajib dan sumbangan-sumbangan lainnya kepada dana perwalian UNTAET atau InterFET. Walau demikian, kami memasukkan sumbangan yang secara khusus dirancang untuk Timor Lorosa'e yang dibuat melalui badan-badan multilateral, TFET (Trust Fund for East Timor, Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e) atau CFET (Consolidated Fund for East Timor, Dana Gabungan untuk Timor Lorosa'e).

Informasi tentang dana perwalian CFET dan TFET masing-masing berasal dari UNTAET dan Bank Dunia, dan menggambarkan cadangan yang dibuat untuk kedua dana tersebut sampai dengan Oktober 2001. Dana-dana tersebut dapat diperbandingkan dari satu negara dengan negara lain. Semua informasi lain berasal dari negara-negara dan badan-badan donor. Kami mewawancarai wakil-wakil dari enam negara yang memberikan bantuan terbesar, yang besarnya melebihi 94% dari seluruh bantuan bilateral, non-darurat, non-militer kepada Timor Lorosa'e, dan menganalisis informasi yang mereka berikan. Setiap negara memiliki tahun anggaran sendiri, mata uang sendiri dan cara sendiri dalam mengelompokkan dan menelusuri sumbangannya. Harap berhati-hati dalam membandingkan sumbangan suatu negara dengan negara lain.



Bantuan darurat, sepanjang akhir tahun 1999 sampai 2000, diberikan untuk pemulihan jangka pendek trauma 1999. Banyak dari bantuan itu berupa barang, seperti makanan dan bahan untuk membuat rumah. Donor-donor bilateral dan multilateral lainnya menyumbang sekitar \$80 juta selain \$112 juta yang diperlihatkan dalam bagan ini, tetapi kami tidak mempunyai informasi khusus. Grafik pada halaman-halaman berikut tidak memasukkan sumbangan darurat apa pun.

Sumbangan CFET (Consolidated Fund for East Timor) disalurkan kepada ETТА atau ETPA, pemerintah Timor Lorosa'e, digunakan untuk apa saja yang menurut kabinet transisi ini paling penting. Setelah merdeka, CFET akan dikelola oleh pemerintah Timor Lorosa'e yang dibentuk melalui pemilu. Total: \$54,5 juta telah diberikan sampai saat ini.

TFET (Trust Fund for East Timor, Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e) dikelola oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dan digunakan untuk proyek-proyek khusus yang dijalankan oleh kedua bank tersebut bekerjasama dengan UNTAET (Lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol.1, No.4). TFET akan dibelanjakan uangnya dan akan berakhir riwayatnya dalam beberapa tahun mendatang. Bank Dunia sendiri menyumbang \$10 juta untuk TFET, yang merupakan penyumbang terbesar dari "18 donor lainnya" dari Total: \$112,8 juta yang telah diberikan sampai saat ini.

Program-program bilateral lainnya diputuskan oleh donor, dan akan dibahas lebih lanjut pada halaman-halaman selanjutnya. Ada sejumlah program bantuan bilateral yang disokong oleh donor-donor lain, tetapi kami tidak mempunyai informasi rinci tentang ini dan kami yakin bahwa jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan bantuan-bantuan yang ditunjukkan disini, atau dibandingkan dengan sumbangan donor-donor ini untuk TFET dan CFET. Angka-angka dalam bagan ini jumlah seluruhnya sampai sekarang \$191 juta.

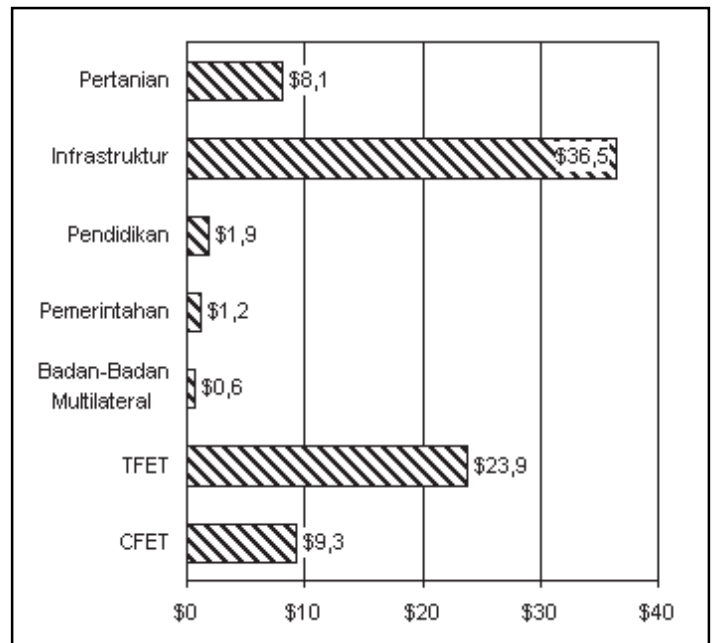
Jepang (\$81,6 juta bantuan non-darurat)

Pemerintah Jepang memberikan sumbangan \$34,3 juta sebagai bantuan kemanusiaan pada tahap darurat kepada organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR dan WFP, kepada seruan gabungan badan-badan PBB dan permintaan ICRC, dan kepada NGO-NGO Jepang yang membantu para pengungsi dalam negeri dan orang-orang yang kembali ke Timor Lorosa'e dari pengungsian.

Jepang juga berjanji untuk memberikan sumbangan \$100 juta untuk rehabilitasi dan pembangunan di Timor Lorosa'e selama tiga tahun dari 2000 sampai 2002. Lebih dari \$68 juta telah disalurkan, termasuk \$9 juta untuk CFET dan \$24 juta untuk TFET. Bantuan tambahan Jepang untuk rehabilitasi dan pembangunan telah diberikan melalui badan-badan PBB seperti UNDP, FAO, dan UNICEF, dan juga secara langsung melalui Misi Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA, badan bantuan luar negeri pemerintah Jepang). Prioritas bantuan Jepang adalah infrastruktur, pertanian, dan pembangunan sumberdaya manusia. Sebagian besar bantuan masuk dalam semua kelompok ini.

Sumbangan utama lain dari Jepang adalah \$100 juta kepada UN InterFET Trust Fund (Dana Perwalian InterFET PBB) untuk memfasilitasi partisipasi negara-negara berkembang dalam operasi militer darurat pada tahun 1999. Kami tidak memasukkan dana InterFET dalam analisis ataupun grafik buletin ini.

Sejumlah sumbangan barang dan jasa dan pengeluaran bagi kerjasama teknik seperti partisipasi orang Timor Lorosa'e dalam kursus pelatihan dan pengiriman pakar-pakar Jepang tidak dimasukkan dalam grafik karena kurangnya data.

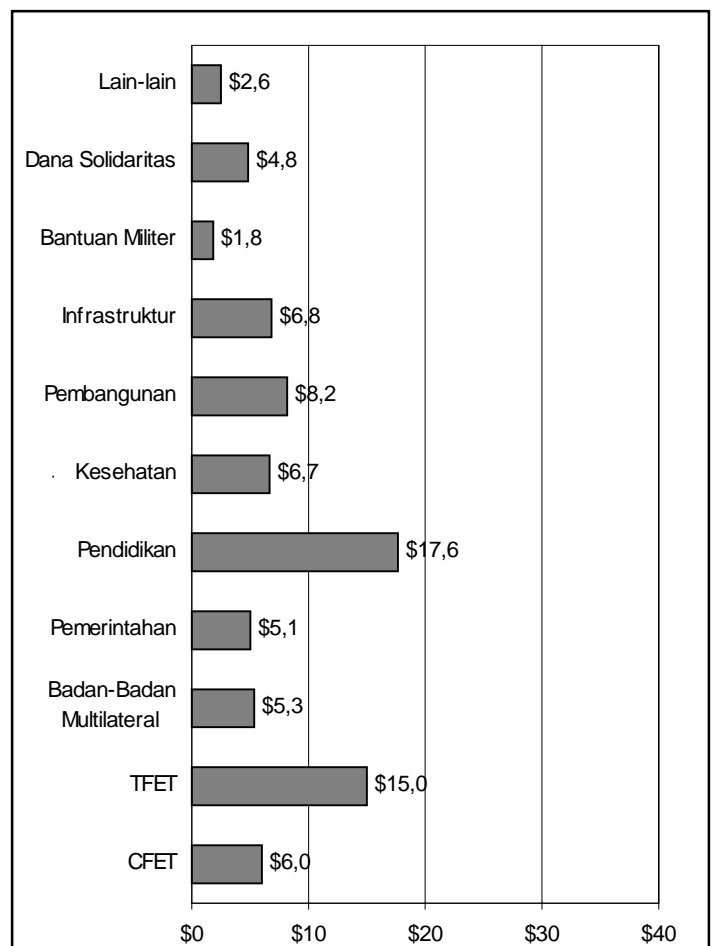


Portugal (\$79,8 juta bantuan non-darurat)

Semua bantuan Portugal kepada Timor Lorosa'e dikelola oleh CATTIL (Comissário para o Apoio à Transição em Timor Leste, Perwakilan untuk Bantuan Transisi di Timor Lorosa'e), bagian dari Kementerian Luar Negeri. Salah satu prinsip umum politik luar negeri Portugal adalah "mempertahankan dan memperkuat bahasa Portugis", dan banyak dari bantuan Portugal di bidang pendidikan digunakan untuk mempromosikan bahasa Portugis di Timor Lorosa'e. Tahun depan, sekitar 57% dari program bilateral Portugal akan difokuskan untuk keperluan ini.

Meskipun sebagian besar bantuan untuk Timor Lorosa'e berasal dari anggaran pemerintah nasional, sumbangan dari masyarakat sipil Portugal membentuk Dana Solidaritas (yang dikelola oleh CATTIL) untuk membiayai berbagai proyek "bantuan sosial dan aksi kemanusiaan". Dana Solidaritas sebesar \$4,8 juta yang telah dilaporkan hanyalah menggambarkan aktivitas sampai akhir tahun 2000, karena La'õ Hamutuk tidak berhasil memperoleh informasi terakhir tentang aktivitas-aktivitas dari dana ini.

Portugal adalah satu-satunya negara yang telah mengeluarkan nota kesanggupan kepada TFET (tidak dimasukkan dalam grafik). Dalam sistem ini, pemerintah Portugis akan memberikan tambahan \$15 juta kepada TFET pada akhir tahun 2001, dan lebih dari \$20 juta untuk dua tahun mendatang.

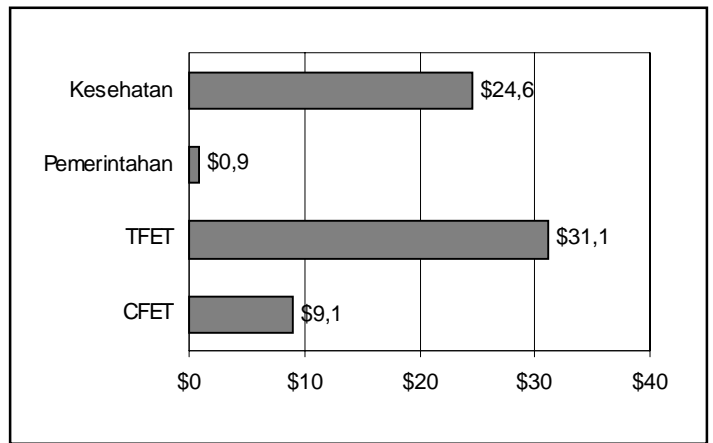


Uni Eropa (\$65,6 juta bantuan non-darurat)

Komisi Eropa (European Commission, EC) adalah badan eksekutif dari Uni Eropa (persatuan masyarakat Eropa), yang terdiri dari 15 Negara Anggota, yang masing-masing punya hak mengajukan legislasi. Sejauh ini EC telah menjanjikan \$31.140.000 untuk TFET dan \$9.065.000 untuk CFET. Bantuan kemanusiaan telah disalurkan oleh European Commission Humanitarian Aid Office (ECHO, Kantor Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa), melalui kontrak dengan NGO-NGO internasional, Organisasi-organisasi Pemerintah Internasional dan badan-badan PBB.

ECHO telah memberikan bantuan melalui organisasi-organisasi tersebut di bidang kesehatan dan obat-obatan, bantuan makanan, dan bukan-makanan, air dan sanitasi, pengungsi dan pengungsi dalam negeri (*internally displaced people*), dan tempat tinggal. Di sektor kesehatan, dana ECHO telah mendukung kegiatan NGO di 8 dari 13 distrik di bawah Rencana Kesehatan Distrik (*District Health Plan*) yang disusun bersama dengan Divisi Pelayanan Kesehatan, ETTA sampai dengan pertengahan tahun 2001. Sampai sekarang, sekitar \$33.326.000 telah disanggupi dengan hampir \$24.556.000 telah dicairkan dan \$7.454.000 lainnya telah disalurkan melalui World Food Program dalam bentuk bantuan makanan.

Komisi Eropa juga memberikan sumbangan \$877.000 untuk pemilu 30 Agustus 2001.



Australia (\$45,0 juta bantuan non-darurat)

Bantuan pembangunan Australia kepada Timor Lorosa'e disalurkan melalui AusAID, badan bantuan pemerintah Australia. Meskipun demikian, anggaran bantuan Australia juga mencakup "dana-dana lain" kepada bank-bank pembangunan multilateral termasuk Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dan badan-badan pembangunan internasional seperti UNICEF, UNDP dan UNAIDS. Angka-angka ini tidak termasuk bantuan yang berasal dari departemen-departemen tertentu pemerintah federal (seperti personil yang dipinjamkan atau diperbantukan), atau dari pemerintah negara-negara bagian dan lokal Australia.

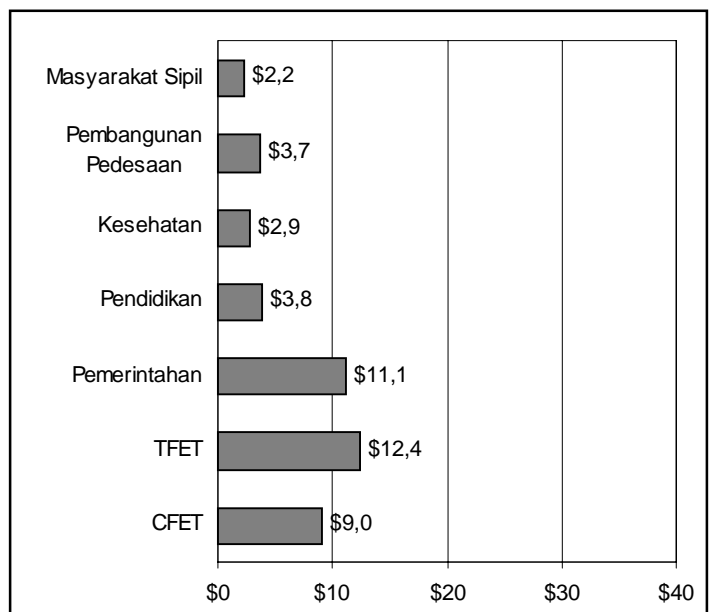
Bantuan Australia tersebar luas dalam berbagai kegiatan di Timor Lorosa'e, tetapi ada beberapa bidang yang diutamakan. Pada tahun 1999, Australia menanggapi kekerasan militer/milisi Indonesia dengan program tanggapan darurat terbesar yang pernah dilakukannya. Bantuan Australia kepada Timor Lorosa'e telah berjalan melalui tiga tahap penting:

- 1) bantuan kemanusiaan darurat
- 2) rekonstruksi dan pembentukan pemerintahan
- 3) pembangunan jangka panjang

Prioritas saat bantuan Australia saat ini adalah:

- * pemerintahan dan peningkatan kemampuan
- * kesehatan dan pendidikan
- * pembangunan pedesaan, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi
- * masyarakat sipil

Jumlah yang cukup besar dari anggaran AusAID juga disalurkan ke dua dana perwalian utama (CFET dan TFET), yang dijalankan oleh UNTAET dan Bank Dunia. Proyek-proyek penting yang didanai Australia pada tahun terakhir meliputi pembaharuan gedung Majelis Konstituente, pelatihan guru bahasa Inggris dan guru umum, dan program pembangunan pedesaan empat-tahunan yang dimulai di tiga distrik.



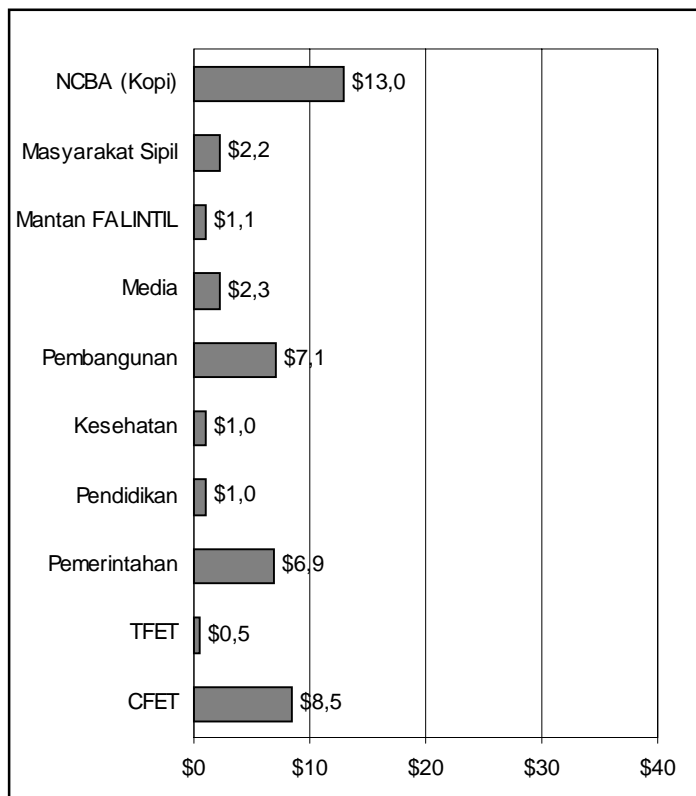
Amerika Serikat (\$43,6 juta bantuan non-darurat)

Amerika Serikat secara khusus menyalurkan lebih banyak bantuannya untuk program-program khusus dibandingkan sebagian besar negara donor lain. Banyak bagian dari dana bantuan itu disalurkan melalui badan-badan perantara yang berpusat di Amerika Serikat, seperti International Republican Institute, Internews, atau Asia Foundation, yang menerima uang dan cukup leluasa menentukan ke mana uang itu dibelanjakan. Hibah juga diberikan kepada lembaga-lembaga Timor Lorosa'e dan UNTAET, NGO-NGO Timor Lorosa'e, atau masyarakat lokal, tetapi hampir semuanya berupa hibah barang atau jasa.

Sejauh ini penerima tunggal terbesar bantuan Amerika Serikat di Timor Lorosa'e adalah National Cooperative Business Association (NCBA), yang mengorganisir petani-petani kopi lokal dalam koperasi-koperasi dan memproses serta memasarkan panen kopi mereka untuk diekspor.

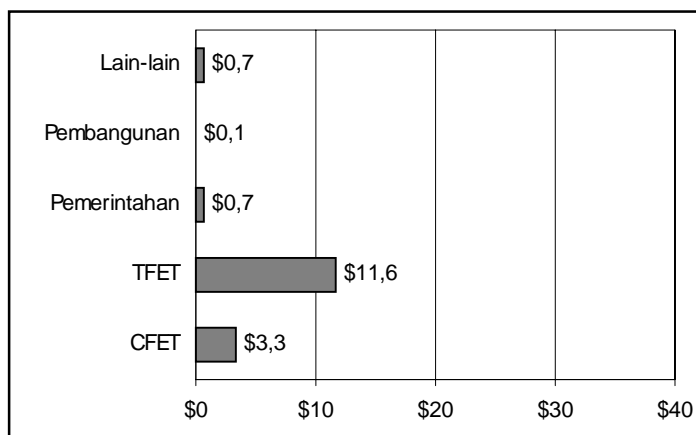
Amerika Serikat dan Bank Dunia memberikan dana untuk sebuah program, yang di manajemen oleh International Organization for Migration (IOM), dimana membiayai sebuah program yang membantu para mantan pejuang FALINTIL yang tidak masuk angkatan bersenjata Timor Lorosa'e untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat setempat. Prioritas lain bantuan Amerika Serikat adalah mendukung NGO-NGO lokal, pemantauan pemilu dan pendidikan kewarganegaraan, sistem peradilan, dan proyek-proyek swadaya masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui program TEPS dan BELE.

Selain bantuan bilateral yang dibahas dalam laporan ini, Amerika Serikat juga memberikan bagian terbesar dari sumbangan wajib PBB (digunakan untuk UNTAET dan PKF), sekitar \$200 juta, yang lambat dibayarkan oleh Washington. Lebih dari \$11 juta juga telah dibelanjakan untuk U.S. Support Group East Timor (USGET), sekitar selusin tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Hotel Central Maritime dan melayani prioritas Amerika Serikat, bukan untuk kepentingan PKF atau UNTAET. Selain merupakan kehadiran permanen militer Amerika Serikat di sini, USGET mengorganisir kunjungan kapal ketika para pelaut dari kapal-kapal perang AS menjalankan proyek-proyek kemanusiaan dan pengobatan jangka pendek.



Inggris (\$15,8 juta bantuan non-darurat)

Kerajaan Inggris (Britania Raya dan Irlandia Utara) menyediakan sebagian besar bantuannya kepada Timor Lorosa'e melalui dana perwalian TFET dan CFET, dan tidak memperuntukkannya bagi sektor atau program khusus. Bantuan Inggris tidak terikat pada barang dan jasa asal Inggris. Inggris juga memberikan beasiswa kepada orang-orang Timor Lorosa'e untuk belajar di Inggris, dan mendanai penelitian King's College London tentang kebutuhan pertahanan Timor Lorosa'e.



Berita Singkat...

Pada tanggal 29 Oktober, para pejabat ETTA dan Bank Dunia menandatangani sebuah Perjanjian Hibah sebesar US\$13,9 juta untuk Program Revitalisasi Sistem Sekolah Tahap II (untuk informasi tentang Tahap I dari Program ini lihat *Buletin La' o Hamutuk* volume 2, no.5). Proyek ini akan membangun lima *escola basica* baru, suatu sekolah komunitas percontohan yang terdiri dari ruang kelas sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga balai masyarakat dan perpustakaan. Selain lima sekolah baru itu, proyek tersebut akan mengubah sembilan sekolah lainnya dengan menggunakan model *escola basica*. Proyek ini juga akan memperbaiki 65 sekolah sampai “tingkat kualitas dasar”. Meskipun diakui adanya kebutuhan mebel bagi 100.000 lebih siswa, proyek ini hanya akan membuat mebel bagi kebutuhan sekolah-sekolah yang dibangun atau direnovasinya. Ron Isaacson dari Bank Dunia mengatakan kepada La' o Hamutuk bahwa ia tidak tahu darimana dana untuk mebel sekolah yang masih dibutuhkan, dan ada harapan bahwa akan ada bantuan dari donor bilateral. Proyek ini akan menggunakan prosedur penawaran kompetitif internasional, yang memungkinkan orang-orang dan perusahaan-perusahaan Timor Lorosa'e untuk mengikuti tender, meskipun mereka menerapkan syarat-syarat yang pada dasarnya menyingkirkan perusahaan-perusahaan kecil dari prosesnya.

Komentar La' o Hamutuk: La' o Hamutuk akan terus mengumpulkan informasi tentang proyek ini untuk Buletin yang akan datang. Sudah terlihat jelas bahwa para tukang kayu dan pedagang asal Timor Lorosa'e mempunyai keterampilan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan ini. Semua donor yang memberikan bantuan kepada Timor Lorosa'e harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan lebih pengembangan kemampuan orang Timor Lorosa'e, dan sebanyak mungkin dana untuk pembangunan Timor Lorosa'e harus tetap tinggal di dalam negeri ini.

Pemerintah Jepang telah mengirimkan tim pertama dari dua tim ke Timor Lorosa'e untuk mempersiapkan pengiriman 700 anggota Self-Defence Force (SDF/PBD, Pasukan Bela Diri), demikian nama angkatan bersenjata Jepang. Pasukan PBD menurut rencana tiba pada Maret 2002, sebagai bagian dari Pasukan Penjaga Perdamaian (PKF) PBB di Timor Lorosa'e. Mereka akan berada di sini selama bertahun-tahun, untuk menggantikan tentara dari Bangladesh dan Pakistan yang membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan di wilayah perbatasan dengan Timor Barat. Sebuah tim survei PBD yang terdiri dari 26 orang itu pada 26 November memulai survei selama satu minggu di Timor Lorosa'e untuk mempersiapkan penempatan pasukan. Tokyo menyebut pengiriman pasukan PBD yang direncanakan itu sebagai suatu “jawaban untuk harapan yang besar atas kerjasama Jepang yang dinyatakan oleh para pejabat PBB dan pemimpin Timor Lorosa'e”. Banyak NGO Jepang – sebagian darinya bekerja untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan Timor Lorosa'e – telah menyatakan penentangan mereka terhadap rencana Tokyo itu. Banyak NGO Timor Lorosa'e juga menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pasukan Jepang. Salah satu sebabnya, mereka memperhatikan penolakan Jepang untuk meminta maaf dan memberikan ganti-rugi atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan-pasukannya ketika menduduki Timor Lorosa'e selama Perang Dunia II, dan keterlibatan Jepang dalam pendudukan Indonesia. (Lihat “Sekilas” dalam *Buletin La' o Hamutuk*, Vol. 2, No. 5 dan 6-7)). Tetapi, para pejabat PBB telah mendukung

rencana Tokyo tersebut, demikian pula Xanana Gusmão dan Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta. Ramos-Horta mengkritik NGO-NGO Timor Lorosa'e yang menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya mengurus pekerjaan mereka sendiri dan membiarkan masalah-masalah luar negeri diurus oleh pejabat pemerintah.

Pada 17 Oktober, Komisi Perencanaan Nasional (National Planning Commission, NPC) yang baru dibentuk mengadakan rapatnya yang pertama. Dalam rapat itu mereka menyepakati kerangka acuan dan struktur komisi, yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan masyarakat sipil. Seperti yang telah diusulkan negara-negara donor utama kepada Timor Lorosa'e, Komisi akan membuat rencana pembangunan nasional dalam waktu enam bulan. Fokus rencana itu adalah “pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat dan mengurangi kemiskinan”. Pada 15 November, Xanana Gusmão memimpin seminar sehari untuk membahas peran masyarakat sipil dalam kerja Komisi. Pertemuan itu memusatkan perhatian pada bagaimana partisipasi dan konsultasi masyarakat akan dilakukan, suatu masalah yang sangat memprihatinkan NGO lokal. Komisi secara kuat menyuarakan perlunya kemitraan penuh dengan masyarakat sipil, karena Komisi ini tidak punya kemampuan untuk melakukan sendiri seluruh proses itu.

Komentar La' o Hamutuk: Kami juga punya kekhawatiran yang sama dengan banyak NGO lokal yang merasakan bahwa jangka waktu enam bulan untuk menyelesaikan rencana itu adalah tidak realistis dan menghalangi kemungkinan proses partisipasi yang sejati. Kualitas partisipasi masyarakat bawah dalam pembuatan rencana semacam itu seharusnya tidak bisa ditawar-tawar.

Pada 26 Oktober, Ketua Dewan Menteri Timor Lorosa'e Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Portugis António Guterres menandatangani sebuah kesepakatan kerjasama media antara Portugal dan Timor Lorosa'e. Menurut kesepakatan ini pemerintah Portugis, melalui televisi nasional RTP dan radio nasional RDP akan memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk mengembangkan fasilitas televisi dan radio publik nasional Timor Lorosa'e. Kesepakatan dengan “tujuan keseluruhan memperkuat sarana untuk meningkatkan penyiaran dalam bahasa Portugis”, akan memungkinkan pertukaran bebas acara-acara televisi antara Timor Lorosa'e, Portugal, dan enam negara berbahasa Portugis lainnya. Kesepakatan yang memberikan status bebas pajak di Timor Lorosa'e bagi RTP dan RDP pada awalnya berlaku selama lima tahun, dengan perpanjangan otomatis setiap lima tahun pada masa mendatang.

Pada 10 November, pemuda Timor Lorosa'e menyelenggarakan seminar di Timor Lorosa'e berjudul “Dengan Mengenang Tragedi 12 November 1991, Kita Memperkuat Persatuan, Toleransi dan Rekonsiliasi”. Pada seminar itu Uskup Belo mengusulkan pembentukan Yayasan 12 Nopember untuk mengumpulkan data tentang orang-orang yang hilang pada pembantaian tersebut, dan untuk mengorganisir keluarga para korban. Dalam catatan lain, Adérito de Jesus Soares mengatakan bahwa bertentangan dengan komentar-komentar para pemimpin politik Timor Lorosa'e, pengadilan internasional itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Ia mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada tahun 1991, juga 1999, bisa digolongkan sebagai kejahatan berat

terhadap kemanusiaan, yang mengharuskan dibentuknya sebuah pengadilan internasional. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar semua orang Timor Lorosa'e yang prihatin mengenai masalah ini, termasuk NGO dan perorangan, harus mulai mengumpulkan bukti untuk mendukung proses pengadilan di masa mendatang. Adérito menyimpulkan kalau bukti dan kesaksian sudah siap para pelaku kejahatan dapat diajukan ke pengadilan.

Para peserta dalam Seminar tentang Keadilan dan Pertanggungjawaban di Dili pada 16 Oktober (lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol. 2, No. 6-7) **menindaklanjuti pertemuan itu dengan menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB.**

Surat yang serupa, mendesak pendirian sebuah pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e, dikirimkan oleh International Federation for East Timor (IFET, Federasi Internasional untuk Timor Lorosa'e), Asia-Pacific Coalition on East Timor (APCET, Koalisi Asia-Pasifik untuk Timor Lorosa'e, dan lain-lain. Makalah-makalah dan surat-surat dari seminar itu dimasukkan dalam laporan yang telah dicetak dalam bahasa Inggris dan Indonesia dan bisa diperoleh di La'o Hamutuk dan organisasi-organisasi penyelenggara lainnya, atau *on line* di <http://www.etan.org/lh/misc/justconf1.html>.

Menurut sebuah laporan bertanggal 27 Nopember, **Jaksa Agung Timor Lorosa'e yang baru, Longuinhos Monteiro mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak menganggap sah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 6 April 2000 antara UNTAET dan pemerintah Indonesia.** Monteiro sampai pada kesimpulan ini setelah bertemu dengan Jaksa Agung Indonesia, M.A. Rahman. MoU tersebut mewajibkan UNTAET dan Indonesia untuk "saling memberikan bantuan yang seluas mungkin" di bidang-bidang seperti melaksanakan perintah penangkapan, mengirimkan tersangka pelaku "kejahatan berat", memberikan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang relevan, mewawancarai para saksi dan orang-orang yang dicurigai. Meskipun pemerintah Indonesia tidak pernah mematuhi kesepakatan ini, ini merupakan penyangkalan resmi yang pertama kali terhadap kesepakatan itu. Menurut Monteiro, "Indonesia mengatakan bahwa perjanjian pada 6 April 2000 itu tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak disetujui oleh parlemen Indonesia" dan bahwa "tidak akan ada warganegara Indonesia yang akan diserahkan" untuk diadili di Timor Lorosa'e. Para pejabat UNTAET/ETPA dan pejabat-pejabat Indonesia telah setuju untuk mengadakan pertemuan di Bali pada bulan Desember untuk menyusun kesepakatan yang baru.

Komite PBB tentang Penyiksaan (United Nations Committee on Torture) mengecam keras pemerintah Indonesia karena tidak menjamin keadilan bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e dan di Indonesia. Menurut sebuah laporan bertanggal 22 November yang dikeluarkan pada akhir dari sidang terakhirnya, Komite

itu mengungkapkan keprihatinan mengenai suatu "iklim kekebalan hukum" di Indonesia yang telah gagal mengajukan ke pengadilan "anggota-anggota militer, kepolisian, atau pejabat-pejabat negara, khususnya mereka yang menduduki jabatan tinggi, yang diduga keras telah merencanakan, memerintahkan dan/atau melakukan tindakan-tindakan penyiksaan dan perlakuan yang buruk". Laporan tersebut juga menyatakan keprihatinan tentang "keterbatasan geografis dan jangka waktu pada mandat dari pengadilan *ad hoc* hak-hak asasi manusia (Indonesia) untuk Timor Lorosa'e yang akan dibentuk" dan merekomendasikan agar pengadilan itu "mempunyai kapasitas untuk menangani banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia yang diduga keras telah terjadi di sana dalam kurun waktu antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999".

Pada 3 Desember, Kelompok Kerja Gender dan Konstitusi (Gender and Constitution Working Group) menyampaikan T-shirt dan poster dari kampanye mereka kepada para anggota Majelis Konstituante. Tindakan simbolik itu untuk mengucapkan terima kasih kepada para anggota dan merayakan keberhasilan usaha *lobby* Kelompok Kerja itu. Kelompok Kerja berkembang dari sebuah lokakarya yang disponsori oleh Oxfam Australia pada bulan Juli, dan telah mengadakan kampanye untuk perlindungan hak-hak gender dalam konstitusi. Wakil-wakil perempuan dari seluruh distrik berpartisipasi dalam pembuatan "Piagam Hak-Hak Perempuan di Timor Lorosa'e" (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2, No. 5), yang memperoleh dukungan yang bersemangat dari Sergio de Mello. Kampanye Kelompok Kerja menggunakan media untuk memberikan informasi tentang masalah gender kepada masyarakat, dan *me-lobby* para anggota Majelis Konstituante. Setelah bekerja keras selama berbulan-bulan, 95% dari masalah-masalah yang dikampanyekan Kelompok Kerja itu masuk dalam rancangan konstitusi. ❖

Editorial: Para Donor Harus Baik (*dari halaman 8*)

memperhatikan jumlah infrastruktur yang berfungsi, alih keterampilan, atau pembangunan ekonomi, sulit melihat kemana perginya semua uang itu.

Pemerintah baru negeri ini seharusnya boleh tidak efisien – bukan 90%, tetapi lebih dari nol persen. Bukan saja mereka harus menyelesaikan pembangunan kembali, transisi dan pengembangan kapasitas yang ditinggalkan dalam keadaan tidak selesai oleh Pemerintah Transisi, mereka juga harus menciptakan landasan bagi sebuah negara yang stabil dan perekonomian yang bisa bertahan lama. Kami mendesak para donor untuk bersikap baik dalam hal jumlah dan semangat selama beberapa tahun mendatang. Kalau diberi kesempatan, Timor Lorosa'e dapat mengelola bantuan internasional secara efektif tanpa pengarahan rinci dari luar negeri. Kesempatan itu ada – akankah masyarakat donor memungkingkan kesempatan itu? ❖

Siapa itu La'o Hamutuk?

Staf Orang Timor: Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio Juvinal, Adriano do Nascimento, Jesuina (Delly) Soares Cabral

Staf Internasional: Pamela Sexton, Mayumi Hachisuka, Vijaya Joshi, Charles Scheiner, Andrew de Sousa

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares, Carolina Maria Do Rosario

Penerjemah: Djoni Ferdiwijaya, Nug Katjasungkana

La'o Hamutuk berterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.

Editorial: Para Donor Harus Baik, Tanpa Syarat

Buletin La'o Hamutuk edisi bulan Juli 2000 (Vol. 1, No. 2) menurunkan editorial bahwa negara donor harus menganggap bantuan mereka kepada Timor Lorosa'e sebagai suatu bentuk keadilan, bukan amal. Mengingat masyarakat internasional telah mengabaikan dan justru terlibat dalam pendudukan Indonesia selama beberapa puluh tahun, kami mendesak bahwa Timor Lorosa'e harus diberi kesempatan untuk berkembang dan maju. Sebagai "provinsi" yang dipaksakan oleh Indonesia, Timor Lorosa'e telah miskin sebelum ekonomi Indonesia runtuh pada 1997. Krisis ekonomi Asia dan penghancuran tahun 1999 memperburuk warisan ekonomi yang menyedihkan akibat berabad-abad kolonialisme Portugis dan puluhan tahun pendudukan Indonesia.

Lebih dari setahun kemudian, para donor telah mengalirkan lebih dari satu milyar dolar Amerika ke Timor Lorosa'e, dan wilayah itu sedang membentuk pemerintahannya sendiri. Bagian terbesar dari uang itu digunakan untuk mendukung kehadiran besar-besaran militer dan sipil internasional di sini, karena sangat tinggi dan mahalnya pengeluaran administrasi PBB dan operasi PKF. Ketika UNTAET berakhir, sebagian dari ketidakefisienan itu akan berakhir pula.

Meskipun keamanan militer Timor Lorosa'e cukup terjamin, keamanan ekonominya tidak. Pembangunan kembali infrastruktur jauh dari memadai, pelayanan-pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, air dan listrik sangat kurang. Pembangunan ekonomi jangka panjang jarang diperhatikan.

Kami mendorong para donor untuk meneruskan dan memperluas dukungan mereka bagi pemerintah dan lembaga-lembaga Timor Lorosa'e, terutama karena proyek-proyek yang sebelumnya didanai melalui dana sumbangan wajib PBB sekarang harus didanai dengan dana sumbangan sukarela. Bidang-bidang yang sebelumnya kurang diperhatikan, yang ditanggihkan selama masa transisi tetapi sangat penting bagi Timor Lorosa'e untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, perlu lebih diperhatikan. Negara yang baru merdeka ini akan memerlukan dukungan internasional ketika ia bergabung dengan masyarakat internasional, yang telah membiarkannya jatuh ke dalam kematian dan kehancuran sejak tahun 1975 sampai 1999. Meskipun Indonesia mungkin tidak mau membayar ganti-rugi, negara-negara dunia yang lebih makmur harus mendengarkan hati nuraninya ketika mereka mengevaluasi bantuan keuangan bagi Timor Lorosa'e.

Seperti halnya dengan negara-negara lain di dunia, banyak bantuan bilateral di sini juga mencerminkan prioritas dari si pemberi atau dana tersebut mengalir kembali ke negara donor. Para donor mengedepankan agenda politik dan ekonomi mereka; badan-badan internasional dan NGO-NGO internasional mengelola proyek-proyek, menghabiskan sebagian dari dana-dana itu; uang digunakan untuk membayar para konsultan asing atau mengimpor barang-barang yang berasal dari negara donor itu sendiri. Kami tidak berangan-angan bahwa bantuan untuk Timor Lorosa'e dapat memutus sepenuhnya pola-pola ini. Walaupun demikian, kami mendorong para donor untuk berusaha menjamin bahwa sebagian terbesar dari bantuan mereka sampai ke rakyat Timor Lorosa'e. Ketika negeri ini mendapatkan kemerdekaan politik, kemandirian ekonomi seharusnya juga menjadi sasaran. Kami mendesak para donor untuk memungkinkan rakyat Timor Lorosa'e – melalui pemerintah yang terbentuk melalui pemilu dan wakil-wakil

masyarakat sipil– untuk memutuskan apa yang perlu didanai dan bagaimana bantuan itu harus dikelola dan dibelanjakan.

Sejak akhir tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, NGO-NGO internasional, pemerintah-pemerintah asing dan lembaga-lembaga internasional lainnya telah berbuat banyak hal yang baik bagi negeri ini. Tetapi satu hal yang belum mereka lakukan adalah memberikan contoh manajemen yang efisien, tanggap dan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun para donor mungkin merasa lebih nyaman dengan meneruskan kerja melalui lembaga-lembaga asing ini, sudah waktunya membiarkan orang-orang Timor Lorosa'e melakukan kesalahan-kesalahannya sendiri (seperti yang dilakukan oleh setiap orang, bahkan ketika tidak melakukan sesuatu yang baru dan penuh tantangan). Ketika rakyat Timor Lorosa'e belajar dari proses ini, pelajaran itu akan terus memberikan manfaat bagi negara ini.

Sudah lebih dari satu milyar dolar diberikan kepada UNTAET. Administrator Transisi Sergio Vieira de Mello menyebutnya "terang-terangan tidak masuk akal" bahwa misi ini (UNTAET) "menghabiskan 10 dolar dana sumbangan wajib PBB untuk dirinya sendiri dari setiap dolar sumbangan sukarela yang digunakan untuk mengurus" Timor Lorosa'e. Hampir setengah dari jumlah itu telah dikeluarkan dalam bentuk bantuan bilateral, sangat sedikit dari jumlah itu masuk ke Timor Lorosa'e, lebih banyak yang keluar lagi melalui perekonomian bisnis orang asing setelah singgah sebentar di pulau ini. Ketika seseorang

(Melanjutkan di halaman 7)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk adalah organisasi Timor Loro Sa'e-Internasional yang bertujuan memantau dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi utama yang ada di Timor Loro Sa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik dan sosial. Institut La'o Hamutuk ini beroperasi dengan dasar pemikiran bahwa rakyat Timor Loro Sa'e harus menjadi pemutus utama dari proses pembangunan kembali tersebut dan, prosesnya harus se-demokratis dan se-transparan mungkin. Dalam hal ini, *La'o Hamutuk* melakukan suatu analisis yang tidak berpihak terhadap kegiatan Internasional di Timor Loro Sa'e dengan tujuan memfasilitasi partisipasi yang efektif dan bertingkat oleh rakyat Timor Loro Sa'e dalam proses pembangunan kembali. Selain memberi informasi dan analisis tentang proses rekonstruksi dan pembangunan, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara institusi-institusi dan organisasi-organisasi internasional dengan masing-masing bidang dalam masyarakat Timor Loro Sa'e. Akhirnya, *La'o Hamutuk* menjadi pusat sumber informasi dengan berbagai bacaan, tentang model pembangunan, pengalaman dan praktek yang berlainan, dan juga memfasilitasi jaringan antara kelompok-kelompok Timor Loro Sa'e dengan ahli-ahli dan pelaksana-pelaksana yang terlibat dalam hal proses pembangunan di seluruh dunia.

Di dalamnya roh menganjurkan transparansi yang lebih kuat. La'o Hamutuk ingin sekali mengundang individual untuk kontak kami bila anda punya naskah-naskah dan/atau informasi yang harus dikemukakan perhatian buat rakyat Timor Loro Sa'e dan juga para anggota masyarakat internasional.